

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai acuan dari peneliti di dalam melakukan penelitiannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1.	Yudika Amanda Putra Silaban (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Tahun 2009-2012)	Kepemilikan institusional (X1) Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela(Y)	<i>purposive sampling</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Komite Audit

					berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
2.	Nur Fitri Riznawati dan Andayani (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan sukarela	<i>Corporate Governance</i> (X1), ukuran perusahaan (X2) Pengungkapan sukarelae (Y)	Analisis Regresi berganda	Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan spesialisasi industri KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI
3.	Pancawati Hardiningsih (2008)	Analisis factor faktor yang Mempengaruhi <i>Voluntary Disclosure</i> Laporan Tahunan Perusahaan	factorfaktor yang Mempengaruhi (X1) <i>Voluntary Disclosure</i> (Y)	<i>purposive sampling</i>	Porsi kepemilikan saham, basis perusahaan, size berpengaruh terhadap <i>voluntary disclosure</i> ROI dan leverage tak berpengaruh dengan <i>voluntary</i>

					<i>disclosure</i>
4.	Azwir Nasir, Elfi Ilham dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45 yang terdaftar	Karakteristik perusahaan (X1) <i>Corporate Governance</i> (X2) Perusahaan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45 yang terdaftar (Y)	<i>Purposive sampling.</i>	<i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan ( <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45 yang terdaftar).
5.	Khairiah dan Raida Fuadi (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan (Studi pada perbankan Syariah di Indonesia)	Faktor-faktor (X1) pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan (X2) Studi pada perbankan Syariah di Indonesia	Metode sensus dalam menganalisis populasi penelitian	Ukuran perusahaan, likuiditas, <i>leverage</i> dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perbankan syariah di Indonesia.

**Sumber: Data diolah dari hasil penelitian terdahulu**

### 2.2.1 Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) yaitu Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Farid dan Siswanto (2011) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

### **2.2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan**

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan menjadi ajang untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor terutama pengungkapan yang bersifat sukarela. Laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setahun sekali, berisi data keuangan (laporan keuangan) dan informasi non-keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu perusahaan kepada pihak eksternal dan internal perusahaan. Sedangkan informasi non-keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan pengungkapannya tergantung dari kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Laporan tahunan menjadi media komunikasi informasi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor, dan *stakeholder*. Selain itu, laporan tahunan juga dijadikan media pertanggungjawaban manajer dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan perusahaan.

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Chariri dan Ghozali, 2007:377). Jika dikaitkan dengan kata, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian membaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.

Pengertian pengungkapan dalam laporan keuangan menurut Stice (2000) dalam Christianti (2008), pengungkapan dalam laporan keuangan

adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Evans (2002:334) mendefinisikan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah

*“Disclosure means supplying information in the financial statements including in the statements themselves, the notes to the statements and the supplementary disclosures associated with the statements”.*

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan perlu disertai dengan informasi-informasi pendukung yang sering kali disebut dengan istilah pengungkapan, agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi dalam menafsirkan laporan keuangan.

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the realease of information*). Akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang perusahaan dalam laporan keuangan, umumnya laporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Pengungkapan yang memadai bukan berarti banyaknya penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat yang panjang lebar, melainkan pengungkapan persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh auditor sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan para konsumennya dan tidak merugikan bagi perusahaan atau pemegang saham.

Karena kewajaran penyajian, laporan keuangan bergantung pada cukup tidaknya pengungkapan-pengungkapan mengenai hak-hak yang cukup materiil. Hal-hal yang cukup materi dan perlu diungkapkan adalah erat hubungannya dengan:

- a. Bentuk, susunan dan isi laporan keuangan serta penjelasan-penjelasan yang dilampirkan.
- b. Istilah-istilah yang digunakan.
- c. Banyaknya perincian-perincian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.
- d. Dasar penilaian atau penentuan dari jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, misalnya dasar penilaian persediaan, dasar penentuan penyusutan aktiva tetap.
- e. Aktiva-aktiva yang dipakai sebagai jaminan pinjaman.
- f. Deviden yang tertunggak, pembatasan pembagian deviden dan hutang-hutang yang bersyarat.

Adanya kepentingan-kepentingan yang berafiliasi atau yang menguasai serta sifat dan volume transaksi-transaksi dengan kepentingan tersebut.

### **2.2.3 Tujuan pengungkapan**

Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan menurut (Chariri dan Ghozali, 2007:382) bahwa tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional.

- b. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya menilai jumlah, pengakuan tentang penerimaan kas bersih.
- c. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan.
- d. Menyediakan informasi tentang hasil usaha (performa keuangan) suatu perusahaan selama satu periode.
- e. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.
- f. Untuk membandingkan antara perusahaan dan antar tahun. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.
- g. Untuk membantu investor dalam menerapkan *return* dan investasinya.

#### **2.2.4 Jenis Pengungkapan**

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan terdiri atas dua jenis (Meek, *et al*, 1995 dalam Hardiningsih, 2008) antara lain:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam laporan tahunan perusahaan yang diwajibkan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal.
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan tahunan harus diungkapkan yang proporsi pengungkapannya tidak hanya bergantung pada

kemampuan pembacanya, tetapi juga bergantung pada standar yang ditetapkan. Menurut Hendriksen dan Breda (2002:432) terdapat tiga konsep pengungkapan yaitu:

- a. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) Pengungkapan yang cukup yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana informasi dan angka-angka yang disajikan dalam laporan tahunan dapat diinterpretasikan oleh investor dan para pihak yang berkepentingan.
- b. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan untuk menerima informasi yang handal sehingga tidak ada ketimpangan informasi antar para pembacanya.
- c. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi sebagian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara berlimpah sehingga tidak tepat. Menurut mereka terlalu banyak informasi akan membahayakan. Karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan sulit ditafsir oleh para penggunanya.

### 2.2.5 Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.6 yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau bagi perusahaan publik menjelaskan perusahaan wajib untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal (BAPEPAM). Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung tingkat pengungkapan. Semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, tetapi secara materi perusahaan akan berbeda-beda dalam hal jumlah pengungkapan informasinya ke pasar modal (Healy dan Palepu, 1993 dalam Hardiningsih (2008)). Tingkatan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada tingkatan pengungkapan yang disediakan oleh sumber-sumber lain. Salah satu pertimbangan manajemen dalam mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela (*voluntary disclosure*) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Perusahaan akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit consideration*). Oleh karena itu, sebelum manajemen menyebarkan informasi perusahaan, biaya dan manfaat dari penyediaan informasi tersebut harus diperbandingkan.

Informasi dalam laporan keuangan merupakan sinyal bagi para investor dalam memberikan prospek atau pandangan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan oleh manajemen harus dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, sehingga memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Keputusan tepat yang diambil investor sebelum berinvestasi akan berdampak pada hasil (*feedback*) yang sesuai harapan.

Manajemen sebagai agen diberi wewenang oleh pemegang saham (*principal*) untuk mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan mempunyai lebih banyak informasi daripada pihak luar mengenai kinerja perusahaan saat ini maupun kinerja masa depan.

Padahal, pemegang saham sebagai pihak yang memberikan mandat membutuhkan informasi yang mendetail dan berkala mengenai perusahaan. Manajemen berinisiatif untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela dalam laporan tahunan. Menurut Choi dan Meek (2010), pengungkapan informasi ini juga dilakukan manajemen karena:

- 1) Pengungkapan sukarela berdampak pada likuiditas saham Perusahaan
- 2) Pengungkapan sukarela dapat mengurangi *cost of capital* (biaya modal)
- 3) Pengungkapan sukarela berdampak pada biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan sukarela sejatinya sangat bermanfaat bagi perusahaan.

Karena dengan adanya Pengungkapan sukarela, maka nilai perusahaan dimata investor akan meningkat yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Harga saham bagi perusahaan mengindikasikan kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana di pasar modal.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan salah satu indikator adanya praktek *Good Corporate Governance*. Beberapa aspek internal yang dianggap mempengaruhi keputusan pengungkapan sukarela adalah *corporate governane* dan *culture characteristic*. Perusahaan - perusahaan yang sudah *listed* di bursa saham bersaing untuk mendapatkan dana dari para investor dengan cara memberikan informasi akuntansi. Biasanya, manajemen akan secara sukarela memberikan informasi kepada para investor sehingga diharapkan pasar akan meresponnya. Respon pasar ini tercermin melalui harga saham yang meningkat. Harga saham yang meningkat ini akan meningkatkan pula nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan dianggap baik di mata investor. Pemberian informasi akuntansi juga diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen (agen) dengan para pemegang saham (prinsipal) sehingga *agency conflict* dapat diminimalisir.

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menganalogikan bahwa manajemen berlaku sebagai agen dan pemegang saham (*shareholder*) berlaku sebagai prinsipal. Prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan yang terkait dengan

perusahaan guna kepentingan prinsipal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, agen akan melaporkan keadaan perusahaan melalui pelaporan keuangan. Dalam teori keagenan terkadang timbul asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal ini disebabkan agen berinteraksi secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan prinsipal hanya mengandalkan laporan yang dibuat oleh agen untuk mengetahui informasi perusahaan.

Pengungkapan berkaitan erat dengan praktik *corporate governance* dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin melalui suatu teori agensi (*agency theory*). Teori agensi berdasarkan literatur empiris menyatakan adanya hubungan substitusi dan pelengkap antara *corporate governance* dan pengungkapan. Selain itu, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengungkapan sukarela adalah dua mekanisme kontrol yang digunakan untuk melindungi investor dan mengurangi konflik keagenan (Septiani, 2011).

Shareholder hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan saja untuk mengetahui kondisi dan kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan. Terkadang ada konflik yang timbul antara shareholder dan manajemen (*agency conflict*). Oleh karena itu, guna mengurangi konflik keagenan diperlukan suatu mekanisme eksternal seperti pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Adanya suatu pengungkapan seyogyanya mampu menjembatani kepentingan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Selain itu, praktik *corporate governance* dalam perusahaan juga

diharapkan mampu meminimalisir *agency conflict* yang terjadi antara agen dan prinsipal.

Pihak manajemen perusahaan berkeinginan untuk memberi sinyal berupa informasi akuntansi dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) kepada pasar untuk bersaing mendapatkan dana dari investor (*signalling theory*). *Signalling theory* menyebutkan bahwa manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen memiliki dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi. Untuk mendapatkan respon pasar maka perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi perusahaan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mampu menjadi investasi yang potensial bagi investor. Informasi ini meningkatkan ekspektasi investor terhadap perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan di mata publik. Perusahaan dianggap dapat memberikan prospek masa depan yang lebih menjanjikan sehingga hal ini berimbas terhadap harga saham yang lebih tinggi (Alvarez, *et al*, 2008:601).

Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan informasi yang melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Indikator luas pengungkapan sukarela yang merupakan rasio antara jumlah aitem informasi yang diungkapkan. Makin besar indeks pengungkapan sukarela berarti semakin luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Menurut Wulandari (2015) ada beberapa daftar item indeks pengungkapan sukarela yaitu:

1. Uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial.
2. Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.
3. Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.
4. Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
5. Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
6. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif.
7. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau akan dilaksanakan.
8. Uraian mengenai program riset dan pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai.
9. Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan dimasa yang akan datang.
10. Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.

11. Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa memandang suku, agama dan ras.
12. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.
13. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja.
14. Informasi mengenai level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang.
15. Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan.
16. Informasi mengenai manajemen senior yang dapat meliputi nama, pengalaman dan tanggungjawabnya.
17. Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen.
18. Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solfabilitas untuk 5 tahun atau lebih.
19. Laporan yang memusat elemen-elemen laba rugi yang perbandingan untuk 3 tahun atau lebih.
20. Laporan yang memusat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih.
21. Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji atau upah, tunjangan dan pemotongan.
22. Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.

23. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan kedalam komponen tetap dan variabel.
24. Mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan terhadap sebuah Proyek.
25. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.
26. Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.
27. Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan.
28. Informasi harga saham untuk setiap masa tri wulan untuk 3 tahun atau lebih.
29. Informasi mengenai komposisi karyawan.
30. Informasi mengenai sistem komunikasi dan informasi perusahaan.
31. Informasi mengenai kepala audit internal yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawab.
32. Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan.
33. Struktur kepemilikan pemegang saham perusahaan.

### **2.3 *Good Corporate Gavernance***

Istilah “*corporate governance* “ pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commite, Inggris ditahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *cadbury Report*. Menurut Cadbury, *Good Corporate Gavernance* adalah :

*“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, and other international and external stakeholder in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”*. “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelolaan) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development*, *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang terarah dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan agar setiap elemen perusahaan bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

*Corporate Governance* menurut Sutedi (2011: 1) adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undang dan nilai-nilai etika”

*Good Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalagunaan masing-masing organ perusahaan menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktifitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya sehingga dicapai hasil usaha yang maksimal.

Pengukuran *Good Corporate Governance* menggunakan pengukuran dewan komisaris, komite audit, manajemen dan pemegang saham (Wahidahwati, 2010).

### **1. Board of Commissioners / Dewan Komisaris**

Menurut undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum / khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Beasley (1996) dalam Herianto (2013) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris dari luar dapat mengurangi kecurangan pelaporan keuangan dari pada kehadiran komite audit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurang dewan dan karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer. Menurut Setyarini (2011) dalam abdillah (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan dapat memonitoring yang dilakukan CEO semakin efektif.

### **2. Audit Committee / Komite Audit**

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen. Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang

Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

### **3. *Management / Manajemen***

Manajemen atau direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan .

### **4. *Shareholder / Pemegang Saham***

Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih [saham](#) pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam [bursa efek](#) berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan [dewan direksi](#), hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat [likuidasi](#) perusahaan.

Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apapun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

### **2.3.1 Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance***

*National Committe on Governace* (NCG, 2008) mengemukakan lima prinsip *Good Corporate Governance* :

#### **1. *Transparency***

Disebut juga prinsip keterbukaan, artinya kewajiban bagi para pengelolaan untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu pada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada yang dirahasiakan, disembunyikan ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda, pengungkapannya (Agoes dan Ardana, 2014;104).

#### **2. *Accountability***

*Accountability* merupakan prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk memberi sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu

diperlukan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif.

### **3. *Responsibility***

Prinsip yang mewajibkan para pengelola memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam pengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip pertanggung jawabada sebagai konsenkuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

### **4. *Fainss (kesetaraan dan kewajaran)***

Prinsip yang memerlakukan para pengelola agar memperlakukan para pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, kariyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder(pemerintah, masyarakat dan yang lain).

### **5. *Independen (Kemandirian)***

Merupakan suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

### **2.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance***

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Mc Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor intitusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menggunakan *Corporate Governance*.
2. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan upntuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
4. Kalaupun *Corporate Governance* bukan obat mujarab untuk keluar dan krisis, sistem ini menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang sesuai lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.

### **2.4 Pengaruh Antar Variabel**

*Good Corporate Governance* merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, pihak kreditor , pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan.

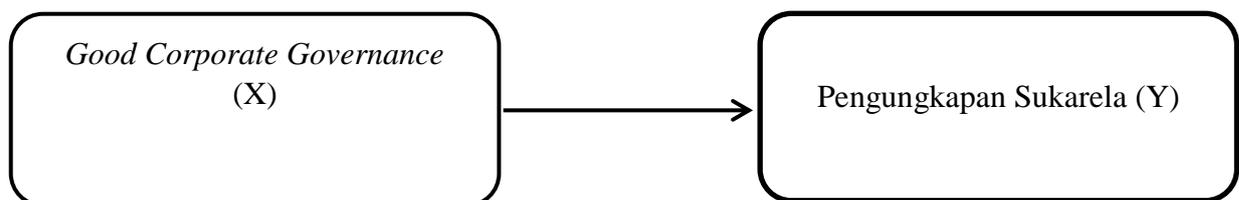
Dengan adanya *Good corporate governance* ini diharapkan meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap manajemen, mengurangi masalah keagenan

dan pengungkapan yang lebih transparan Hasan (2013). Adanya *Good Corporate Governance* dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan Hal ini karena adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan transparansi yang lebih besar bagi pemegang saham (Allegrini dan Greco, 2011). Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan (Pujiati, 2013).

## 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau yang bisa juga disebut dengan kerangka pemikiran ini merupakan penetapan suatu masalah yang diciptakan pada suatu materi tentang relevan dan aktualisasinya dalam pemikiran ini disusun perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan pemecahan masalah.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka konseptual**



Menurut Sugiono (2014:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh praktik *corporate governance*, terhadap Pengungkapan Sukarela.

H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh praktik *corporate governance*, terhadap Pengungkapan Sukarela.